



## **Korupsi Sumber Daya Alam**

Bakoel Coffee, 25 Mei 2018

**Tama S. Langkun**  
Koordinator Divisi Hukum dan  
Monitoring Peradilan

# Pembahasan

1. Penegakan hukum dalam korupsi sumber daya alam.
2. Kerugian negara (kajian ICW).
  - Akibat deforestasi.
  - Dari ekspor timah ilegal.
  - Dari kurang catat ekspor bijih nikel.
3. Ancaman terhadap gerakan penyelamatan sumberdaya alam.
  - Kriminalisasi pejuang lingkungan dan anti korupsi (masyarakat sipil dan pengambil kebijakan di level daerah)
  - Penganuliran pencabutan izin melalui putusan pengadilan TUN.
  - Gugatan perdata terhadap saksi ahli dalam mengungkap korupsi dan kejahatan lingkungan.

“Dalam kurun waktu 2010-2017,  
sekurangnya 271 orang menjadi  
tersangka dalam perkara korupsi  
Sumber Daya Alam”

# Korupsi Sumber Daya Alam

Sektor	Jumlah
Perkebunan	45
Kehutanan	22
Pertambangan	23
	90

- Catatan ICW sepanjang 2010 sampai dengan 2017.
- Perkara dicatat berdasarkan statusnya yang sudah sampai penyidikan (ada penetapan tersangka).
- Perkara yang dikumpulkan merupakan perkara yang ditangani oleh KPK, Kepolisian dan Kejaksaan.

# Potensi kerugian akibat deforestasi

- Tingginya jumlah volume kayu yang mengalami deforestasi selama tahun 2006 - 2015.
- Melalui kompilasi data dokumen yang dikeluarkan oleh BPS, diketahui bahwa jumlah volume kayu yang mengalami deforestasi mencapai angka yang tinggi dengan mencapai 2.547.023.080 m<sup>3</sup>.
- Ketimpangan antara jumlah kayu yang tidak tercatat dan tercatat. Data BPS mencapai jumlah 2.547.023.080 m<sup>3</sup>, sedangkan yang tercatat oleh KLHK sebanyak 202.777.529 m<sup>3</sup>.
- Potensi penerimaan negara mencapai Rp. 499,51 Trilyun.

# Potensi kerugian akibat ekspor timah yang tidak tercatat

- Volume perdagangan/ekspor timah (HS 8001 dan 8003) yang diindikasikan tidak tercatat (ilegal) selama periode 2004 - 2015 sebanyak 389.678 MT.
- Indikasi transaksi yang tidak tercatat ini sebesar US\$ 6,081 miliar atau setara dengan Rp 79,052 triliun
- Mengakibatkan kerugian negara dari kewajiban pembayaran royalti dan pajak PPh Badan selama periode 2004 - 2015 sebesar Rp 6,520 triliun, yang berasal dari royalti sebesar Rp 2,371 triliun dan pajak PPh Badan sebesar Rp 4,149 triliun.

# Kurang catat Nilai Ekspor Bijih Nikel (HS 2604) periode 2007 - 2015

- Adanya perbedaan data volume ekspor bijih nikel (HS 2604) periode 2007 -2015 antara yang tercatat pada pemerintah Indonesia (Kemendag, ESDM) dengan data negara - negara pembeli (importir).
- Meskipun sudah diberlakukan larangan ekspor mineral mentah (ore), pada periode Februari 2014 - Feb 2017 terdapat realisasi ekspor bijih nikel dari Indonesia yang dicatat pada pemerintah China.
- Indikasi ketidakwajaran harga ekspor bijih nikel (unit values) periode 2007 - 2015 yang dicatat oleh pemerintah dibandingkan dengan yang dicatat oleh negara - negara pembeli. Hal ini berakibat kepada indikasi kurang catatnya nilai ekspor bijih nikel periode 2007 - 2015 sebesar Rp 56,913 triliun.
- Indikasi kerugian negara dari ekspor bijih nikel karena kurang catat harga periode tahun 2007 - 2015 sebesar Rp 5,800 triliun, yang terdiri dari :
  - A. Indikasi kerugian negara dari kewajiban royalti periode 2007 - 2015 sebesar Rp 2,843 triliun,
  - B. Indikasi Kerugian negara dari kewajiban pajak penghasilan badan perusahaan nikel periode 2007 - 2015 sebesar Rp 2,957 triliun.
- Adanya potensi tambahan penerimaan negara dari PPh Badan akibat ekspor bijih nikel kurang catat nilai periode 2007 - 2015 sebesar Rp 11,828 triliun.

# Kepala Daerah & Korupsi Perizinan

No	Kasus	Tahun Penyidikan/ Tersangka	Tersangka	Jabatan
1	Korupsi penyalahgunaan wewenang dalam persetujuan dan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Sultra 2008-2014	2016	Nur Alam	Gubernur Sulawesi Tenggara
2	izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan nikel	2017	Aswad Sulaiman	Bupati Konawe Utara, Sultra
3	Dugaan korupsi izin kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muarakaman, Kutai Kartanegara	2017	Rita Widyasari	Bupati Kukar
4	Suap Izin tambang di kab Tanah Laut	2015	Adriansyah	Anggota DPR RI
5	Penyalahgunaan wewenang menerbitkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan di Pelalawan	2013	Rusli Zainal	Gubernur Riau
6	Dugaan korupsi dalam izin alih fungsi hutan tanaman industri di Riau	2014	Annas Maamun	Gubernur Riau

# Kerugian Negara & Nilai Suap

No	Kasus	Kerugian Negara	Suap
1	Dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang dalam persetujuan dan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Sultra 2008-2014	4,300,000,000,000	
2	Dugaan korupsi izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan nikel	2,700,000,000,000	
3	Dugaan korupsi izin kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muarakaman, Kutai Kartanegara		6,000,000,000
4	Dugaan suap Izin tambang di kab Tanah Laut		500,000,000
5	Dugaan penyalahgunaan wewenang menerbitkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan di Pelalawan	265,000,000,000	
6	Dugaan korupsi terkait dengan izin alih fungsi hutan tanaman industri di Riau		2,000,000,000
		7,265,000,000,000	8,500,000,000

[Home](#) / [News](#) / [Nasional](#)

# Gubernur Sultra Nur Alam Divonis 12 Tahun Penjara

**ABBA GABRILLIN**

Kompas.com - 28/03/2018, 23:10 WIB



Close Ads X

Hafidz Mubarak A Terdakwa kasus korupsi penerbitan Izin Usaha Pertambangan, Nur Alam (kiri) mendengarkan keterangan saksi saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (15/1). Sidang dengan terdakwa

## Rezim baru perhitungan kerugian negara

- Pertamakalnya kasus korupsi pertambangan dihitung dengan pendekatan delik kerugian negara.
- Kerugian negara yang dihitung tidak terbatas pada akibat tambang, tetapi akibat kerugian ekologis/lingkungan. Menurut KPK, total kerugian negaranya mencapai 4,3 triliun rupiah.
- Basuki Wasis mengungkapkan bahwa perkara korupsi ini mengakibatkan kerugian Negara yang berasal dari musnahnya atau berkurangnya ekologis/lingkungan pada lokasi tambang di Pulau Kabaena sebesar 2.728.745.136.000 rupiah.
- BPKP berkeyakinan bahwa perkara ini telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar 1.596.385.454.137 rupiah. Sehingga jika dihitung secara keseluruhan, kerugian Negara dalam perkara ini mencapai 4.325.130.590.137 rupiah.

# Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam (GNPSDA)

- GNPSDA merupakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam antara KPK dan 29 pimpinan Kementrian dan Lembaga.
- Penandatanganan kesepahaman ini di tandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

# Progres IUP Sumsel versi Dinas ESDM

NO	PUSAT/ PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	PKP2 B	KK	SEBELUM KORSUP KPK	SETELAH KORSUP KPK	SETELAH VERIFIKASI PERMEN 43	IUP DICABUT/ DIAKHIRI
1	Pusat	9	1	-	-	-	-
2	Provinsi			6	19	19	-
3	Muara Enim			72	19	15	4
4	Ogan Komering Ulu			20	9	9	-
5	Lahat			51	31	27	4
6	Ogan Komering Ilir			36	9	4	5
7	OKU Timur			10	3	3	-
8	Musi Banyuasin			70	35	32	3
9	Ogan Ilir			7	2	1	1
10	Empat Lawang			19	1	1	-
11	OKU Selatan			8	7	3	4
12	Prabumulih			5	4	4	-
13	Musi Rawas			35	8	4	4
14	Muratara			0	13	8	5
15	Banyuasin			20	10	8	2
16	Pali			0	5	3	2
	<b>JUMLAH</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>359</b>	<b>175</b>	<b>139</b>	<b>36</b>

Sumber : Dinas ESDM Pemprov Sumsel 15 Mei 2017

# Komponen dan variabel penilaian ICW terhadap GNPSDA

- Kehutanan; Penataan perizinan, sistem pengendalian anti korupsi dan optimalisasi penerimaan negara.
- Pertambangan; Penataan perizinan (penertiban IUP/tidak ada lagi yang tidak ber CNC), pelaksanaan kewajiban keuangan, pengawasan produksi, pelaksanaan pengasawasan penjualan/pengapalan, dan sistem pengendalian antikorupsi.
- Perkebunan; penataan izin dan sistem pengendalian antikorupsi.

Evaluasi mengacu pada matriks rencana aksi yang digunakan oleh KPK dan Kementerian/Lembaga terkait untuk memantau pelaksanaan, dan hasil dari GNPSDA masing-masing sektor.


# Tantangan

1. Lemahnya komitmen pemerintah pusat dan daerah;
  - Melaksanakan agenda penyelamatan sumber daya alam
  - Melakukan evaluasi terhadap gerakan ini.
  - Memperketat aturan-aturan yang tidak pro sumber daya alam dan lingkungan. Bukan sebaliknya, mengobral izin yang justru merugikan lingkungan.
  - Melaksanakan putusan pengadilan.
2. Serangan balik berupa ancaman atau kriminalisasi kepada masyarakat, pemerintah dan penegak hukum serta semua pihak yang mendukung upaya ini.



**Tama S. Langkun**  
Koordinator Divisi Hukum & Monitoring Peradilan

 [tama@antikorupsi.org](mailto:tama@antikorupsi.org)

 0811 993 7669

 @TamaSLangkun

 @TamaSLangkun